



# Policy Strategy Of Rural Agribusiness Business Development Program In The Development Of Agricultural-Based Sharia Microeconomics In West Sumbawa Regency

Zaenafi Ariani

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Mataram

[efisholiha@gmail.com](mailto:efisholiha@gmail.com)

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received : 16-08-2020  
Revised : 02-09-2020  
Accepted : 25-09-2020  
Online : 30-09-2020

### Keywords:

*PUAP, Financing, Agriculture*

### Kata Kunci:

*PUAP, Pembiayaan, Pertanian*

---



## ABSTRACT

A common problem for farmers so far is not having good access to financing institutions, making it difficult to obtain credit or financing of agricultural businesses, such as people's business loans (KUR) from banks. That's why, the Directorate General of Infrastructure and Facilities and Agriculture (PSP) Ministry of Agriculture (Kementan) rolled out the Rural Agribusiness Business Development Program (PUAP) until now. With the revitalization of agricultural financing is expected to be one of the efforts aimed at encouraging and guaranteeing the availability of financing / capital for farmers in the development of farming To support the success of agricultural development, the government through the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia provided Direct Assistance to the Rural Agribusiness Development Community (BLM-PUAP) which was rolled out to the Combined Farmer Groups (Gapoktan) in each village, with the hope that all villages in NTB Province, especially in West Sumbawa Regency can be accommodated.

**Abstrak:** Permasalahan umum bagi petani selama ini adalah tidak mempunyai akses yang baik terhadap lembaga pembiayaan, sehingga sulit untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan usaha tani, misalnya kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan. Itu sebabnya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana dan Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggulirkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) hingga saat ini. Dengan adanya Revitalisasi pembiayaan pertanian ini diharapkan menjadi salah satu upaya yang ditujukan untuk mendorong dan menjamin ketersediaan pembiayaan/permodalan bagi petani dalam pengembangan usaha tani

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang Pertanian, pemerintah melalui Menteri Pertanian Republik Indonesia memberikan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) yang digulirkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di setiap Desa, dengan harapan seluruh desa yang ada di Propinsi NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat dapat terakomodir



<https://doi.org/10.31764/jseit.v1i1>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

## A. LATAR BELAKANG

Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peran penting, antara lain : potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sector ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat yang menjadi basis pertumbuhan di perdesaan. Potensi pertanian Indonesia yang cukup besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin.

Data BPS tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa (14,15%). Dari jumlah tersebut sekitar 20,65 juta jiwa berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Pada umumnya petani di perdesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Pada bulan Maret 2010, BPS mencatat jumlah penduduk miskin turun menjadi 31,02 juta jiwa (13,33%) dan pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin turun menjadi 31,01 juta jiwa (12,46%), artinya terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,01 juta jiwa (0,87%). Namun kemiskinan di perdesaan, akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian

perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan, Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M. Program PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Kementerian Pertanian menetapkan 4 (empat) kebijakan dalam mengembangkan usaha produktif petani dalam mendukung 4 sukses kementerian pertanian yaitu : (1) swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) diversifikasi pangan, (3) nilai tambah, daya saing, dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi dasar yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan. PUAP dilaksanakan dengan fokus pada mekanisme pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan, mengembangkan potensi dan perkuatan kapasitas kelompok masyarakat miskin di perdesaan.

Jaminan social yang merupakan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minimal setiap penduduk, apapun agamanya dan etnisnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak, menjadi prioritas dalam konsep ekonomi islam bahkan hal itu merupakan komitmen keislaman seseorang. Orang yang mendustakannya dan tidak ingin melaksanakannya dianggap telah mendustakan agamanya, seperti ditegaskan dalam Surat Al-Maun ayat 1-3:

Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.

Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-rasid, sector Pertanian adalah sector yang sangat diperhatikan. Hal itu ditulis oleh Abu Yusuf ( 1979: 109-110) bahwa Negara bertanggung jawab membiayai proyek infrastruktur, seperti perawatan irigasi, agar hasil pertanianpun melimpah.

## **B. METODELOGI PENELITIAN**

### **1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas social masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karkter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2011:68).

### **1.2. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti adalah instrument kunci (*key instrument*). Peneliti adalah yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tak berstruktur dan hasil catatan. Hanya manusia sebagai instrument yang dapat memahami makna interaksi antar manusia, mengalami perasaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam ucapan dan perbuatan responden (S Nasution, 1996:9). Peneliti sebagai *key instrument* berfungsi untuk menetapkan focus penlitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiono, 2012:222).

### **1.3. Informan Kunci**

Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan informan kunci. Informan kunci adalah informan yang benar-benar menguasai situasi social yang diteliti. Informan kunci atau informan yang baik adalah informan yang baik adalah informan yang memiliki kriteria sebagai berikut: Mereka yang menguasai atau memahamisesuatu melalui proses

enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. Mereka yang masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai keterangan. Mereka yang cenderung tidak menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri (Sugiono, 2012:221).

#### **1.4. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat Pada 53 Gapoktan penerima Dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

#### **1.5 Prosedur pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiono, 2012:225).

#### **1.6 Prosedur Analisa Data**

Bongdan (dalam Sugiono:2013:88) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya diinformasikan kepada orang lain. Menurut Nasution (dalam Sugiono, 2013:89) analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data, dimana didalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Dalam penelitian ini,

#### **1.5. Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, dilakukan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas (kepercayaan) data dengan teknis triangulasi. Menurut Wiersma (dalam Sugiono,2013:125), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga

jenistriangulasi, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

Empat target capaian sukses Menteri Pertanian yaitu: Sukses swasembada berkelanjutan, sukses diversifikasi pangan, sukses peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta sukses peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu cara untuk mencapai target tersebut salah satunya dengan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP). BLM-PUAP ini diharapkan dapat merubah kehidupan petani ke arah yang lebih baik dan sejahtera, yaitu dengan mengembangkan usaha on farm maupun off farm yang diharapkan bisa berkembang sesuai dengan tahap-tahap pencapaian keberhasilan dana ini yaitu tahap pembentukan, tahap pengokohan dan tahap kemandirian. Tolak ukur keberhasilan dana BLM-PUAP yaitu dengan terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang diharapkan di Kabupaten Sumbawa Barat ini berbentuk Syariah.

- a. Strategi Kebijakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Syariah Berbasis Pertanian Di Kabupaten Sumbawa Barat

#### **Strategis Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMAS)**

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitasi STIMULAN modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gapoktan (*Pedum, 2010, hal.2*). Salah satu Tujuan PUAP adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayah. Maka dari itu, untuk mewujudkannya diperlukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap program PUAP. Adapun bentuk dari pembinaan dan pemanfaatan dana tersebut akan dibentuk Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan

kumpulan dari LKM atau unit usaha simpan pinjam dari seluruh Gapoktan. Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang diharapkan di Kabupaten Sumbawa Barat ini berbentuk Syariah.

Terdapat 3 Gapoktan yang telah memiliki Badan Hukum Koperasi untuk LKMA, yaitu:

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	GAPOKTAN
1	Taliwang	Lalar Liang	Mitra Muda mandiri
2	Taliwang	Lab. Lalar	Kakap Merah
3	Brang Ene	Mura	Muratama

Tabel. 01. Data Gapoktan Berbadan Hukum Koperasi

Desa yang mendapat dana BLM-PUAP adalah sebanyak 58 desa dari 65 desa yang ada di kabupaten Sumbawa Barat, dari 58 desa tersebut seluruhnya akan dibentuk badan hukum dan pengelolaannya berdasarkan sistem syariah. Dengan adanya 58 gapoktan yang berbadan hukum dan sistem syariah maka akan menjadi pendorong bangkitnya ekonomi syariah berbasis agribisnis di Kabupaten Sumbawa Barat.

- b. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Strategi
- Sejak perguliran dana BLM-PUAP di Kabupaten Sumbawa Barat, tidak selamanya berjalan lancar ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana oleh Gapoktan, antara lain:
1. Rapat anggota Gapoktan tidak kontinyu, hanya terlaksana 1 kali setahun yaitu pada Rapat Anggota Tahunan
  2. Dana swadaya khususnya simpanan wajib tidak berjalan lancar hanya
  3. Administrasi/pembukuan tidak teratur
  4. Adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus gapoktan
  5. Adanya anggapan dana PUAP adalah dana hibah yang tidak perlu direvolving
  6. Kurang ketatnya sanksi hukum bagi anggota yang tidak mengembalikan dana PUAP.

Langkah-Langkah Pemecahan Masalah:

1. Selalu mengingatkan Gapoktan untuk mengadakan pertemuan rutin dengan anggotanya dengan mengundang PMT/Penyuluh Pendamping
2. Mempertegas dan memperketat aturan main dalam Awik-awik Gapoktan untuk peminjaman dana PUAP dan sanksi kepada anggota yang menunggak dengan penagihan dari pengurus Gapoktan, Desa dan Kabupaten
3. Membuat Juknis Lokalita yang makin mempertegas aturan dalam penggunaan dana PUAP sehingga peran Pemda lebih besar dalam menerapkan sanksi bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan dana PUAP
4. Perlunya peningkatan pembinaan administrasi Gapoktan yang dilakukan oleh PMT dan Penyuluh Pendamping

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Revitalisasi pembiayaan pertanian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fasilitasi akses petani terhadap pembiayaan/permodalan. Revitalisasi pembiayaan ini ditujukan untuk mendorong dan menjamin ketersediaan pembiayaan/permodalan untuk pengembangan usaha tani.

Pemberian Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dapat membantu modal usaha petani dan juga untuk mengembangkan usaha pertanian dengan modal stimulant dari pemerintah yang dapat dikelola di LKMA masing masing Gapoktan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan petani dapat mengembangkan usaha pertaniannya, sehingga diharapkan agar meningkatkan skala usaha pertaniannya.

PUAP yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayah. Maka dari itu, untuk mewujudkannya diperlukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap program PUAP. Adapun bentuk dari pembinaan dan pemanfaatan dana tersebut akan dibentuk Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan kumpulan dari LKM atau unit usaha simpan pinjam dari seluruh Gapoktan. Keuangan Mikro Agribisnis



(LKMA) yang diharapkan di Kabupaten Sumbawa Barat ini berbentuk Syariah. Dengan terbentuknya 58 LKMA yang dikelola secara syariah, akan mampu menjadi faktor pendorong untuk bangkitnya ekonomi syariah berbasis pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa Barat, 2011. Laporan Perkembangan BLM-PUAP. Taliwang.
- Direktorat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pedoman Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan PUAP, Jakarta. 2011.
- Ditjen PSP. Kementerian Pertanian. *Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian*. 2016.
- Ditjen PSP. Kementerian Pertanian. *Pedoman Teknis Pelaksanaan Fasilitator Pembiayaan Pertanian Swadaya*. 2019.
- [file:///C:/Users/Documents/hasil\\_penelitian/Juklak\\_PUAP\\_Jabar.html](file:///C:/Users/Documents/hasil_penelitian/Juklak_PUAP_Jabar.html), diakses 15 Maret 2012.
- Kementerian Pertanian, 2012. Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Administrasi dan Penyaluran Dana BLM-PUAP.
- Prasetya Irawan, 2009:4.21. Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi; 1 – 12, cetakan 4. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Sugiyono, 2011:38. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Cetakan ke-14. Alfabeta. Bandung.
- Milles, M. B., Hubberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitatif Data Analysis: A Method Sourcebook (3<sup>rd</sup> ed)*. USA : SAGE Publications, Inc.
- Sajogyo. (2007). Pertanian dan Kemiskinan. [www.ekonomi rakyat.org](http://www.ekonomi.rakyat.org). *Jurnal Ekonomi Rakyat*.
- Sulaiman. Rahman. (2005). Sumber Pembiayaan Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan Bangsa. Jakarta: Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Fajar Interpratama Offset.
- Suyatno B dan Karnaji. (2005). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial : Ketika Pembaangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin. Surabaya: Airlangga University Press.